

## **PROYEKSI SOSIAL POLITIK TAHUN 2000-AN<sup>1</sup>**

*Oleh : J. Kristiadi<sup>2</sup>*

### ***Abstrak***

*Era pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Abdurahman Wahid, yang terbentuk melalui drama politik di akhir 1998, di satu segi melahirkan banyak harapan. Namun di pihak lain pemerintahan yang terbentuk ini, merupakan hasil kompromi-kompromi politik, yang belum bisa menunjukkan kinerja yang baik untuk mengatasi berbagai masalah yang diwariskan oleh pemerintah sebelumnya. Dalam konteks yang demikian ini; legitimasi, akseptabilitas, serta moral politik yang tinggi dari pemerintahan dewasa ini adalah modal yang besar untuk mewujudkan harapan rakyat. Persoalannya sekarang ini hanya bagaimana mengelola modal itu dengan suatu manajemen pemerintahan yang lebih profesional sehingga pemerintahan menjadi lebih efektif.*

***Kata kunci : legitimasi, rejim, otoriter, demokrasi, kinerja.***

### **Pengantar.**

Akhir-akhir ini berbagai kalangan dalam masyarakat melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Gus Dur yang akan berumur tepat seratus hari (100) pada tanggal 5 Februari 2000. Dari satu sisi melakukan penilaian

terhadap pemerintahan yang mewarisi kebrokran multi dimensi hanya dalam seratus hari adalah tindakan yang kurang adil. Namun di sisi lain dorongan untuk melakukan evaluasi dapat pula dipahami mengingat ketidaksabaran rakyat yang ingin segera bebas dari penderitaan akibat kesewenang-

---

<sup>1</sup> Makalah pengantar pada Seminar yang diselenggarakan oleh ICDS (Institute For Community And Development Studies) mengenai *Prospek Sosial Ekonomi Indonesia tahun 2000*, pada hari Jum'at, 4 Februari 2000, di Hotel Preanger, Bandung.

<sup>2</sup> Wakil Direktur Eksekutif CSIS, Jakarta.

wenangan penguasa masa lalu. Bahkan asesmen masyarakat terhadap pemerintahan Gus Dur sebenarnya telah dimulai mulai dari 50 hari setelah kabinet terbentuk. Sementara itu hampir setiap hari media massa tidak pernah sepi melakukan catatan dan kritik terhadap pemerintahan Gus Dur – Megawati.

Makalah singkat ini bermaksud memberikan catatan mengenai *performance* pemerintahan Gus Dur yang baru berusia hampir 100 hari, dan mencoba memberikan gambaran proyeksi pada tahun 2000-an.

### **Mewarisi barang busuk.**

Asesmen terhadap pemerintahan Gus Dur menjelang seratus hari lebih proporsional, bilamana terlebih dahulu di-*review* warisan rejim lama yang diterima oleh pemerintahan Gus Dur sebagai berikut. *Pertama*, kebobrokan politik. Remuk redamnya tertib politik yang katanya demokrasi Pancasila dalam prakteknya telah melumpuhkan demokrasi itu sendiri. Kehidupan politik menjadi sangat represif dan mencekam. Rakyat sekan-akan telah berubah menjadi robot karena hanya dapat bergerak kalau digerakkan oleh pusat susunan syaraf politik yang namanya Presiden. Kelumpuhan sistem politik ini telah mengakibatkan kesewenang-wenangan yang luar biasa. Bentuk kesewenangan tidak hanya dalam hal perampokan

terhadap kekayaan negara untuk kepentingan kelompok dan pribadi, tetapi kesewenangan juga berupa kebijakan yang menindas aspirasi rakyat dengan tindakan yang represif sehingga menimbulkan penderitaan rakyat yang luar biasa. Sedemikian dahsyatnya kebobrokan sistem politik yang diwariskan oleh rejim sebelumnya sehingga rakyat menjadi terperangah dan *kikuk* ketika mendapatkan kesempatan melaksanakan kedaulatannya melalui pemilihan umum. Hal itu mencerminkan rakyat sudah lupa kepada kedaulatannya sendiri. Rakyat telah menjadi robot politik. Tindakan represif rejim sebelumnya juga dilakukan dengan menggunakan militer sebagai instrumen politik. Militer yang tidak mempunyai kompetensi mengurus negara menjadi lembaga yang sangat dominan dalam perpolitikan masa lalu sehingga memproduksi kesewenang-wenangan yang sangat masif. Salah satu perwujudan bagaimana hancurnya tatanan politik yang dilakukan oleh rejim sebelumnya adalah akrobat politik yang sangat mendebarakan pada Sidang Umum MPR 1999 yang baru lalu. Meskipun, akhirnya menghasilkan pemerintahan yang mempunyai tingkat legitimasi politik yang tinggi.

*Kedua*, tatanan sosial yang kacau balau. Konflik sosial (horisontal) terjadi dimana-mana dengan jumlah korban yang sangat mengerikan jumlahnya. Ongkos sosial memulihkan hubungan sosial yang harmoni dan penuh toleransi

amat mahal mengingat *social trust* sudah sangat merosot dalam masyarakat. Kasus-kasus berbau SARA berkembang dengan mudah dan mempunyai tingkat eskalasi yang sangat tinggi. Nampaknya titik lemah dari bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang plural dan primordialistik, telah dimanfaatkan sebagai instrumen politik dari para elit yang berebut pengaruh (kekuasaan) dalam masyarakat. Oleh sebab itu maraknya kerusuhan sosial yang merebak dimana-mana bukan sekedar konflik yang disebabkan oleh karena perbedaan ciri-ciri primordial, melainkan perpolitikan yang telah mempergunakan instrumen solidaritas primordial. Ini jelas merupakan bagian dari produk kelumpuhan sistem politik, sehingga masyarakat tidak mempunyai instrumen politik, antara partai politik, yang dapat bebas dari pengaruh ikatan primordial. Instrumen itu yang sangat efektif tetapi mengandung resiko yang sangat tinggi adalah memanfaatkan solidaritas primordial. Oleh karena itu dalam jangka panjang partai politik secara bertahap harus melepaskan diri dari basis yang didasarkan oleh primordialisme agar dapat mempunyai kapasitas melakukan perebutan pengaruh dan kekuasaan secara damai. Tatanan masyarakat semakin rusak karena selain konflik horisontal, terjadi pula konflik vertikal, antara penguasa dan masyarakat, yang ditangani secara militeristik. Karena militer telah menjadi alat penguasa, maka definisi musuh

negara adalah siapa saja, termasuk masyarakat, yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Celaknya, militer sebagai lembaga yang mempunyai tugas pertahanan, yaitu mempertahankan kedaulatan wilayah dari intervensi militer asing, *men-set-up* suatu aparat intelejen yang salah kaprah karena menangani tugas keamanan dalam negeri. Lembaga intelejen seperti yang dikenal sekarang ini adalah *combat intellegent* atau intelejen tempur yang seharusnya bergerak di daerah musuh guna mendapatkan dan mendeteksi semua indikator kegiatan musuh sehingga para komandan lapangan sampai dengan panglima dapat mengambil inisiatif melakukan operasi pengamanan tertutup berbagai fasilitas dan instalasi militer. Celaknya, intelejen ini kemudian dipergunakan untuk mendeteksi musuh pemerintah, yaitu masyarakat yang berbeda pendapat dengan penguasa. Akibatnya siapapun yang berseberangan secara politik dengan pemerintah adalah musuh negara. Seharusnya di dalam negara demokrasi yang menegakkan supremasi hukum, aparat pemerintah yang dapat melakukan deteksi terhadap perbuatan masyarakat yang melawan hukum adalah aparat hukum sendiri. Sehingga aparat intelejen yang harus dikembangkan adalah intelejen hukum yang bertugas sebagai lembaga penyelidik yang melaksanakan tugas dalam kerangka penegakan hukum. Oleh sebab itu intelejen penegak hukum tidak boleh melanggar

hukum. Sementara itu aparat intelejen yang sudah salah kaprah senjatanya adalah *hukum gregetan*. Tindakan penegak hukum tersebut selain harus terukur menurut ketentuan hukum yang berlaku, harus dapat *diaudit* oleh masyarakat melalui pra peradilan, gugatan melalui PTUN maupun melalui parlemen serta opini publik. Beroperasinya aparat intelejen, lebih-lebih karena telah terlalu lama menjadi alat penguasa, menambah rusaknya tatanan masyarakat. Tragisnya, masyarakat (sipil) pun selama tiga puluh tahun diam dan tidak mengerti kalau hak-haknya telah dirampas.

*Ketiga*, tertib hukum yang hancur-hancuran. Asesmen ini nampaknya tidak terlalu sulit dilakukan karena masyarakat dapat merasakan sendiri dalam keadaan sehari-hari bagaimana sulitnya memperoleh keadilan di negeri ini. Hal yang paling pokok adalah bahwa institusi hukum telah menjadi alat penguasa. Aparat penegak hukum adalah alat kekuasaan semata. Sedemikian hancurnya kredibilitas hukum di Indonesia sehingga rakyat kini mencari keadilan dengan caranya sendiri. Anarki sosial terjadi dimana-mana merupakan produk dari anarki kekuasaan yang dilakukan oleh rejim sebelumnya. Kesimpang siuran hukum telah mencapai pada suatu tingkat dimana produk peraturan perundangan hanya melayani kepentingan penguasa, dan oleh sebab itu etika dan tata krama hukum sudah sama sekali diabaikan.

Peraturan yang satu timpang tindih dan tidak sinkron satu sama lain. Untuk menunjukkan hal itu tidak perlu terlalu jauh mendalami masalah hukum. Misalnya, ketentuan hukum yang menentukan usia dewasa berbeda satu sama lain. UU Pemilu menyebutkan tujuh belas tahun atau telah kawin ( pasal 28, UU no 3/1999), UU Perkawinan menyebutkan kalau laki-laki sembilan belas tahun kalau perempuan enam belas tahun ( pasal 7 ayat 1 Uu no 1/1974), UU tentang kesejahteraan anak menyebutkan definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin ( pasal 1 ayat 2 UU no 4/1979 tentang kesejahteraan anak). Contoh tersebut diambil dari ketentuan perundangan yang secara relatif kurang mengandung *vested interest*. Dapat dibayangkan kalau peraturan yang mengandung kepentingan yang melekat diduga semakin semrawut lagi. Peraturan hukum menjadi hutan belukar yang sangat ruwet dan membingungkan.

*Keempat*, moralitas masyarakat mengalami degradasi yang sangat memilukan akibat dari *budaya* kemunafikan yang dikembangkan oleh para penguasa masa lalu. *Kultur* ini semakin meresap kedalam masyarakat melalui pendidikan moral pancasila yang diberikan kepada generasi muda Indonesia mulai dari kanak-kanak sampai dewasa. Tetapi bersamaan dengan itu pula anak-anak menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa apa yang diajarkan di sekolah bertentangan

secara diametral dengan kenyataan sehari-hari. Budaya kemunafikan ini menjadi sangat parah karena dipergunakan untuk mengemas kebijakan publik yang menyengsarakan rakyat. Tidak sedikit kebijakan publik yang berisi kata-kata bagus dan mengatas namakan rakyat berisi tipu muslihat penguasa mengelabui rakyat, dan akibatnya sangat fatal. Sebagai ilustrasi kebijakan yang mempergunakan kata-kata *tata niaga*, semuanya merusak kehidupan rakyat dan akibatnya sampai dirasakan sampai sekarang ini.

*Kelima*, ekonomi. Kiranya tidak usah banyak dikemukakan lagi bahwa masalah ekonomi sudah hancur-hancuran sehingga sebagai bangsa telah mengalami kemiskinan yang sangat meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pengangguran membengkak menja-di lebih dari 60 juta orang pada tahun 1999 (*Kompas*, 16 Oktober 1999), *Debt service ratio* pada tahun 1999 melonjak menjadi 60%, beban hutang pemerintah sekitar 80 milyar dollar AS, dan lain-lain. Faktor sangat penting yang mengakibatkan kemelut ekonomi tersebut adalah sandiwara politik setiap tahun berupa laporan Presiden kepada DPR mengenai pembangunan ekonomi penuh dengan data-data yang dimanipulasi. Sehingga sebutan Indonesia akan segera menjadi macan Asia ternyata hanya macan kertas yang ompong.

### **Modal Pemerintahan Gus Dur.**

Modal paling besar dari pemerintahan Gus Dur adalah legitimasi politik yang dimilikinya, karena dipilih secara demokratis. Oleh karena itu pemerintah sekarang ini mempunyai dukungan rakyat yang riil, akseptabilitas, kredibilitas yang tinggi. Selain itu Gus Dur dan Mega adalah tokoh yang diterima oleh sebagian besar masyarakat. Modal lain dari pemerintah Gus Dur adalah komitmennya terhadap demokrasi. Hal itu dapat dilihat dari *track record* Gus Dur dalam membela masyarakat yang dianggap sebagai perlakuan ketidakadilan. Bahkan kalau diperlukan, menentang aruspun dilakukannya pula. Komitmen terhadap demokrasi juga ditunjukkan antara lain keberaniannya mendirikan *Forum Demokrasi* ditengah-tengah berkuasanya seorang *authoritarian* yang sangat represif. Inisiatif itu diambil dengan resiko dimusuhi dan diperlakukan sangat menyakitkan oleh penguasa yang merasa tidak akan dapat dilawan oleh siapa saja. Oleh sebab itu tidak mustahil bahwa Mukhtar Ciptasung benar-benar menjadi *medan pembataian* yang dilakukan oleh penguasa untuk mencegah Gus Dur dapat menjadi Ketua Umum PB NU.

Komitmen Gus Dur terhadap demokrasi, nampak pula dari pernyataannya bahwa pemerintah bukan segala-galanya. Sesuatu yang dapat dikerjakan oleh masyarakat tidak perlu dicampurtangani oleh

negara. Semangat ini meskipun implementasi didalam kebijakan publiknya nampak tergesa-gesa, seperti misalnya dalam kasus likuidasi Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, mencerminkan bahwa pemerintah Gus Dur akan mencoba tidak terlalu mencampuri urusan masyarakat itu sendiri. Namun tentu hal ini tidak termasuk kasus-kasus seperti di Aceh, Ambon dan Maluku yang sangat memerlukan uluran tangan pemerintah. Kekuatan lain dari Pemerintahan Gus Dur adalah Gus Dur itu sendiri sebagai tokoh NU yang berhasil meningkatkan pamor NU dan faktor *darah biru*, baik dari garis ayah maupun Ibu. Oleh sebab itu dapat dimengerti kalau Gus Dur mempunyai *authority* dan sangat dihormati oleh jutaan umatnya. Oleh karena itu pula langkah-langkah Gus Dur, meskipun kadang-kadang kontroversial, tetapi dapat dipahami oleh para pendukungnya.

Dengan modal tersebut sebenarnya Gus Dur mempunyai legitimasi yang berlapis-lapis untuk dapat melaksanakan visi, gagasan, serta pemikiran-pemikirannya. Namun demikian potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan terdapat kesan bahwa Gus Dur agak segan untuk mempergunakan kekuasaan yang legitimit tersebut. Sehingga banyak kritik yang dilontarkan kepada pemerintahan Gus Dur, antara lain sebagai berikut : kabinet tidak kompak, terlalu jauh mencampuri urusan militer, tidak mempunyai manajer politik, terlalu banyak

mengeluarkan komentar yang *controversial*, lamban menangani masalah Ambon, Maluku, Aceh dan lain-lain, terlalu banyak menyenangkan semua pihak (semua orang), dukungan rakyat dan masa riil yang fanatik akan menimbulkan apa yang disebut rejim otoriter yang populis, perlu penasehat politik yang independen, perlu penata administrasi kepresidenan agar tidak terjadi keteledoran dalam mengelola dokumen negara, kabinet tidak mempunyai *grand policy* dan program yang jelas, Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai *sense of administration dan sense of management*, mengatasi masalah dengan masalah, dan lain-lain.

Selain itu masih terdapat kritik-kritik tajam dan langsung ditujukan kepada pemerintahan Gus Dur, antara lain melalui pengerahan kekuasaan massa di Monas beberapa hari yang lalu. Untungnya pendukung Gus Dur dan Mega yang pasti jauh lebih besar dari pada itu tidak terpancing melakukan hal yang sama. Sebab, pengerahan massa dengan mempergunakan isu-isu primordial sebagai instrumen politik mempunyai resiko yang sangat besar. Namun demikian pemerintah yang demokratis harus toleran terhadap kritik masyarakat. Kritik selain merupakan bagian dari bentuk dukungan masyarakat, dapat pula menjadi energi yang dapat mendorong pemerintah agar lebih mempunyai sensitivitas dalam melakukan kebijakan publik.

### **Sekitar Seratus Hari Pemerintahan Gus Dur.**

Mencermati permasalahan yang penuh dengan bom waktu dan ranjau-ranjau politik yang selalu siap meledak adalah suatu tugas yang sangat berat. Lebih-lebih pemerintahan ini disusun dalam suasana yang penuh kompromi dengan tujuan utama agar dapat meredam sejauh mungkin konflik yang sangat tinggi intensitasnya pada waktu itu. Kompromi saat itu yang merupakan manifestasi *political will* untuk menciptakan suhu politik yang memanas menjadi dingin, ternyata menimbulkan akibat ikutan yang mengandung resiko bagi jalannya roda pemerintahan Presiden Gus Dur. Memang setelah kabinet berumur sekitar seratus hari belum nampak kerja yang secara substansial dirasakan oleh masyarakat. Bahkan terjadi kecenderungan sebagaimana dikhawatirkan banyak kalangan terjadi parpolisasi kabinet sehingga kabinet hanya menjadi sapi perahan partai politik. Selain itu bahaya lain adalah terjadinya paralelisasi antara eksekutif dan kabinet sehingga memperlemah parlemen sebagai lembaga kontrol.

Dalam mengantisipasi kabinet gado-gado semacam itu, dimana terjadi kemungkinan anggota kabinet yang lebih loyal kepada induk partainya dari pada kepada Presiden, Gus Dur banyak menciptakan lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai penasehat atau institusi yang dapat memberikan

*second opinion* kepada Presiden. Tentu kehadiran lembaga itu memerlukan pembagian tugas yang jelas sehingga tidak menambah keruwetan birokrasi. Sementara itu oleh sementara kalangan lembaga-lembaga semacam itu dapat dianggap kroni baru yang justru dapat menggerogoti kredilitas dari pemerintahan Gus Dur itu sendiri.

Kelemahan manajerial Gus Dur yang diharapkan dapat diisi oleh Wakil Presiden ternyata tidak terjadi. Wakil Presiden dianggap oleh sementara kalangan menjadi *liability* dari Presiden karena kurang sigapannya dalam menangani hal-hal yang dianggap urgen oleh masyarakat. Oleh sebab itu dilingkungan kantor Wakil Presiden diperlukan pula manajemen yang lebih sigap, sensitif dan profesional agar kelambanan yang dipermasalahkan masyarakat segera dapat diatasi dengan mengidentifikasi dan mempertajam prioritas penanganan masalah.

Saat ini pemerintahan Gus Dur sebagai pemerintahan transisi, perubahan dari rejim otoriter menjadi pemerintahan demokrasi, mengalami paradoks sebagaimana dialami negara-negara lain yang mengalami proses transisi. Di satu pihak memerlukan pemerintahan kuat dan efektif agar segera dapat menyelesaikan permasalahan yang sangat ruwet, tetapi dipihak lain harus melakukan kompromi-kompromi secara terus menerus agar transisi mendapat dukungan dari semua kekuatan yang ada. Oleh

sebab itu saat ini kepemimpinan yang tegas, arif dan tahan bantingan, sangat diperlukan untuk menyelamatkan masa transisi menuju demokrasi.

### **Prospek Pemerintahan Gus Dur dan Megawati.**

Setelah memahami kompleksitas permasalahan, modal yang dimiliki oleh pemerintah serta kendala-kendalanya, prospek seratus hari pemerintahan Gus Dur adalah sebagai berikut. *Pertama*, Pemerintahan Gus Dur mewarisi permasalahan multidimensional yang tingkat kebobrokan masing-masing dimensi sudah pada tingkat yang mengerikan. Oleh karena itu batasan seratus hari untuk menilai dan mengharapkan terlalu banyak hal-hal yang dilakukan pemerintah Gus Dur menjadi sangat kurang adil. *Kedua*, namun demikian hal tidak berarti bahwa pemerintahan Gus Dur harus dibiarkan untuk berlarut-larut untuk bingung dan kemudian tidak tahu harus berbuat apa. Pemerintahan Gus Dur harus dapat memberikan prioritas mengenai apa yang sangat diperlukan oleh rakyat Indonesia. Oleh karena itu pertama-tama yang harus dilakukan adalah menciptakan pemerintahan (kabinet) yang kompak dan efektif agar pemerintahan dapat segera memperoleh kemajuan yang diharapkan oleh masyarakat. Hal itu dapat dilakukan melalui dua cara sebagai berikut. *Pertama*, melakukan *reshuffle* kabinet. Sesuai

kewenangan konstitusional presiden menyusun kabinet dengan memilih orang-orang yang dianggap kompeten, bersih dan mempunyai integritas moral yang baik. Pilihan itu tentu dapat mempertimbangkan saran-saran siapapun termasuk partai politik pendukungnya. Namun hal itu terbatas kepada saran, dan tidak mengikat agar diperoleh tim yang kompak. Sebab, membiarkan kabinet hasil kompromi tetapi tidak kompak dalam waktu yang terlalu lama akan semakin mendorong terjadinya peralihan medan ajang perebutan pengaruh yang seharusnya terjadi dalam masyarakat berpindah ke lingkungan birokrasi. Berkaitan dengan itu segera diperlukan pula manajemen internal dilingkungan istana agar tidak terjadi kesemrawutan dalam menangani administrasi dan juga untuk mencegah istana medan pertarungan pengaruh kelompok tertentu atau pribadi. Dengan demikian pemerintahan Gus Dur dapat lebih berkiprah dengan terlebih dulu melakukan konsolidasi *inner circle*-nya.

*Kedua*, menegaskan kepada seluruh anggota kabinet melepaskan diri dari kepentingan politik golongan, antara lain tidak secara apriori merekrut orang-orang sekitarnya masuk dalam jajaran departemennya. Rekrutmen harus didasarkan atas kriteria profesional, integritas pribadi serta kebersihan dari segala bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan. Pengangkatan pejabat birokrasi semata-mata atas dasar loyalitas

kepada partai dan mengabaikan kompetensi hanya akan menciptakan kronisme baru.

*Ketiga*, beberapa program prioritas segera dilakukan yaitu menghentikan konflik saling membunuh yang terjadi dimana saja. Prioritas yang sangat ditunggu oleh masyarakat adalah sebagai berikut: (1) menghentikan konflik horisontal yang mengakibatkan saling membunuh diantara warga masyarakat baik yang terjadi di Ambon, Maluku, Aceh dan yang mungkin akan terjadi di daerah-daerah lain. Hal ini menjadi sangat mendesak karena berkaitan dengan kepercayaan luar negeri yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Tanpa adanya jaminan keamanan dan stabilitas politik, muhibah Gus Dur keluar negeri dalam rangka meyakinkan publik internasional bahwa di Indonesia telah terjadi perubahan politik yang demokratis dengan demikian dapat menjamin stabilitas politik dan keamanan akan mubazir. (2) Segera menyelesaikan kasus-kasus yang selama ini dianggap sebagai hal yang sangat membuat rakyat marah, terutama di daerah-daerah tertentu, seperti Aceh, yang merasa sangat diperlakukan tidak adil. Bentuknya adalah pelanggaran HAM. Oleh sebab itu penyelesaian kasus sejenis itu tentu akan sangat membantu stabilitas politik dan keamanan di Indonesia.

Kegagalan Pemerintah Gus Dur dalam menangani masalah-masalah krusial yang dihadapi bangsa ini akan menggerus

legitimasi Gus Dur, dan akhirnya akan berakibat yang fatal mengingat situasi akan bertambah parah. Selain itu kegagalan pemerintah Gus Dur akan menimbulkan beberapa akibat sebagai berikut. *Pertama*, rakyat tidak akan percaya lagi tentang demokrasi. Pelajaran demokrasi yang beberapa bulan terakhir ini yang diberikan kepada rakyat telah menjadi pertunjukan akrobat yang nyaris yang menjungkir balikkan logika demokrasi. Bahkan *penyakit* semacam itu kini merebak di daerah-daerah dengan perwujudan yang serupa. PDI-P yang memperoleh jumlah suara dominan di Dati I dan Dati II, harus berbesar hati untuk tidak berhasil mengegolkan calonnya baik sebagai Gubernur, Bupati/Walikota maupun Ketua DPRD. Lebih-lebih bila pemerintah yang dianggap demokratis gagal memenuhi harapan rakyat, dikuatirkan rakyat tidak akan percaya lagi kepada demokrasi; dan *kedua*, sebagai akibat dari pada itu rakyat akan mendambakan pemerintah yang mampu bertindak tegas terhadap pengacau. Kalau impian itu yang muncul yang akan hadir adalah kekuatan militer. Meskipun hal itu juga bukan sesuatu yang akan terjadi secara otomatis, sebab konteks politik internasional dewasa ini sangat anti terhadap militer di Indonesia. *Ketiga*, bila kerusuhan dan konflik horizontal selalu disederhanakan menjadi sekedar konflik yang disebabkan oleh karena perbedaan ciri-ciri primordial, hal itu akan mendorong

terjadinya eskalasi konflik yang sangat cepat intensitasnya, dan mengakibatkan anarki sosial yang sulit untuk dihentikan, bahkan ancaman konkrit terhadap disintegrasi nasional.

### **Proyeksi Politik tahun 2000-an**

Proyeksi politik pada tahun 2000 masih akan diwarnai oleh ujian-ujian berat bangsa Indonesia dalam menapak kehidupan demokrasi. Runtuhnya rejim otoriter ternyata tidak dengan sendirinya memunculkan tatanan politik yang demokratis. Hal itu disebabkan oleh karena kelumpuhan sistemik seluruh lembaga-lembaga politik, karena selama puluhan tahun penguasa telah memasung kekuatan masyarakat. Kegagapan masyarakat dalam menyikapi momentum demokratisasi antara lain dapat dilihat dari serangkaian peristiwa politik setelah jatuhnya kekuasaan Suharto, proses penyelenggaraan pemilu yang diikuti dengan penghitungan suara yang *berthelethele* oleh KPU, akrobat politik dalam SU MPR, superkompromi komposisi kabinet yang tidak saja mengakibatkan tidak efisien melainkan mengakibatkan pula persaingan dalam mencari pengaruh dan kekuasaan, adalah sekedar contoh bagaimana sulitnya melaksanakan demokrasi.

Bertitik tolak pada kenyataan tersebut dinamika politik tahun 2000 tidak akan beranjak jauh dari pergulatan bangsa Indonesia

mengatasi masalah-masalah yang pelik, seperti kemelut ekonomi, institusi hukum yang telah runtuh, disintegrasi nasional, penegakkan HAM, rumitnya menyelesaikan KKN, dan lain-lain. Oleh sebab itu secara ringkas proyeksi politik tahun yang akan datang dalam percaturan politik akan diwarnai oleh hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, Presiden Gus Dur akan dihadapkan kepada manajemen pemerintahan yang semakin kompleks. Karena anggota kabinet berasal dari partai-partai atau orang yang bukan seratus persen pilihan Presiden sendiri, bahkan seseorang digaransi oleh *lawan-lawan* politiknya. Oleh karena itu Presiden Gus Dur memerlukan kelompok yang lebih *dikenal* dan dekat dengannya untuk didengar pendapatnya sebagai perbandingan. Oleh karena itu dibentuklah berbagai lembaga yang dianggap dapat memberikan *second opinion* kepada presiden, seperti DEN (Dewan Ekonomi Nasional, Dewan Kelautan (maritim), DPUN (Dewan Pengembangan Usaha Nasional), dan mungkin akan dibentuk dewan-dewan yang lain. Konsekwensinya, Presiden Gus Dur perlu mengembangkan manajemen pemerintahan yang efektif, misalnya memberikan peran yang lebih besar kepada para Menko, mengingat kompleksnya jaringan kelembagaan disekitar presiden.

*Kedua*, dinamika partisipasi masyarakat dalam proses politik semakin meningkat mengingat pemerintah Gus Dur nampaknya

menerapkan azas subsidiaritas. Artinya segala hal yang sudah dapat dilakukan oleh masyarakat tidak perlu dicampurtangani oleh pemerintah. Prinsipnya, semakin sedikit campur tangan pemerintah semakin baik. Tentu momentum ini merupakan suatu kesempatan yang sangat baik untuk mendorong partisipasi riil masyarakat dalam mengurus keperluannya sendiri. Namun persoalannya adalah masyarakat telah terlalu lama dikendalikan penguasa sehingga memerlukan waktu agar dapat memanfaatkan peluang tersebut.

*Ketiga*, ruang publik (*public domain*) yang merupakan wilayah dimana masyarakat dapat melakukan debat publik mengenai isu-isu (masalah-masalah besar) nasional akan diwarnai dengan perdebatan-perdebatan mengenai masalah federasi, otonomi luas (daerah), tuntutan keistimewaan (kekhususan) daerah, kemerdekaan, penegakkan HAM, amandemen UUD'45 (*constitucional reform*), paradigma baru TNI, dan lain-lain. Sementara itu kasus-kasus yang telah menjadi kronis, seperti masalah Aceh dan Ambon, akan semakin menjadi meningkat intensitasnya bila tidak segera ada tindakan dan langkah yang *konkrit* dalam mengatasi kedua masalah tersebut.

*Keempat*, kompetisi-kompetisi diantara kekuatan-kekuatan politik diperkirakan akan meningkat terutama dalam memperebutkan posisi-posisi birokrasi yang dianggap basah. Perkiraan ini

didasarkan atas suatu asumsi bahwa partai-partai politik akan didesak untuk melaksanakan konsolidasi politik yang memerlukan dana yang sangat besar. Lebih-lebih berdasarkan pengalaman masa lalu, kebutuhan dana untuk melakukan konsolidasi partai, terutama menjelang pemilihan umum konsolidasi partai politik dan pemilihan umum besar sekali. Sementara itu sumber keuangan partai sampai sekarang masih belum jelas. Oleh sebab itu posisi-posisi basah dapat menjadi ajang yang subur untuk diperebutkan. Sehubungan dengan itu, di dalam undang-undang pemilu yang akan datang harus dilakukan pengaturan-pengaturan yang sangat ketat agar dapat mengontrol keuangan partai. Sementara itu perlu pula mulai dipikirkan *code of conduct* perilaku politik yang dapat menampung hal-hal yang tidak dapat diatur dalam peraturan perundangan.

*Kelima*, dinamika politik lokal akan semakin menonjol sejalan dengan mulai dilaksanakannya otonomi daerah. Politik lokal akan sangat diwarnai oleh debat publik mengenai masalah local yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat setempat, antara lain masalah penyerobotan tanah, perburuhan, pergantian Gubernur atau Bupati/Walikota, dan lain-lain. Sementara itu penataan kelembagaan politik dalam mengelola kekuasaan di tingkat daerah masih akan sangat rentan. Oleh sebab itu dikuatirkan bahwa kapasitas masyarakat melakukan

kontrol terhadap penguasa lokal masih rendah. Bila hal ini tidak segera dilakukan pemberdayaan masyarakat, otonomi daerah justru akan menghasilkan penguasa-penguasa otoriter di daerah yang jumlahnya banyak sekali.

*Keenam*, terjadi paradigma baru dalam memahami stabilitas nasional. Pada masa lalu stabilitas politik selalu dijamin oleh kehadiran militer. Wilayah yang rawan, misalnya disebabkan oleh karena sekelompok masyarakat mempunyai aspirasi atau pendapat yang berbeda dengan penguasa, akan ditekan dengan kekuatan yang represif. Stabilitas politik dan keamanan seperti itu akan nampak efektif tetapi amat rapuh. Pada masa yang akan datang stabilitas politik dan keamanan adalah merupakan suatu produk dari suatu sistem yang dapat menjamin supremasi hukum. Hal itu berarti bahwa tingkat stabilitas politik dan keamanan akan sejalan dengan tingkat perkembangan demokrasi.

Beberapa catatan diatas memberikan gambaran bahwa perjalanan politik bangsa Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan rakyat masih panjang. Diperlukan tingkat kesabaran yang luar biasa serta ketekunan seluruh anggota masyarakat agar perjalanan itu tidak mubazir. Oleh karena bagi mereka yang telah mendapatkan kepercayaan rakyat duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan baik ditingkat pusat dan ditingkat lokal agar dapat memanfaatkan momentum ini. Kesempatan sangat jarang akan

datang yang kedua kalinya, kalau kesempatan pertama dilewatkan begitu saja.

### **Penutup.**

Kegairahan masyarakat memberikan catatan terhadap pemerintahan Gus Dur dapat dipahami mengingat masyarakat mempunyai harapan besar terhadap pemerintah dewasa ini. Harapan semacam itu tidak hanya dimiliki oleh masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat internasional menaruh harapan besar terhadap pemerintahan kombinasi antara Gus Dur dan Mega. Negara-negara Barat amat meyakini bahwa pemerintah sekarang ini memberikan harapan besar bagi tumbuhnya demokrasi. Oleh sebab itu mereka memberikan isyarat memberikan bantuan apa saja yang diperlukan oleh pemerintah. Namun sayangnya, pemerintah Indonesia masih belum dapat menunjukkan *success story* yang sangat diperlukan pemerintah negara-negara sahabat untuk meyakinkan masing-masing masyarakatnya bahwa pemerintah Indonesia dewasa ini sangat menjanjikan (*promising*). Kelambanan menangani skandal KKN, merebaknya kerusuhan adalah beberapa masalah yang segera diatasi.

Kurun waktu seratus hari memang terlalu singkat untuk melakukan penilaian terhadap pemerintah yang dibebani permasalahan raksasa. Namun hal itu tidak berarti bahwa pemerintah

harus larut dalam kebingungan. Legitimasi, akseptabilitas, serta moral politik yang tinggi dari pemerintahan dewasa ini adalah modal yang besar untuk mewujudkan harapan rakyat. Persoalannya sekarang ini hanya bagaimana mengelola modal itu dengan suatu manajemen pemerintahan yang lebih profesional sehingga pemerintahan menjadi lebih efektif.

Bangsa Indonesia dewasa ini sedang mengalami suatu masa yang sangat kritis. Hal itu berkenaan dengan proses masa transisi dari sistem politik yang otoriter menuju ketertiban politik yang demokratis.

Secara empirik negara-negara yang mengalami masa transisi, baik yang terjadi di Afrika, Amerika Latim, Asia, tidak secara otomatis dan mulus menuju terbentuknya konsolidasi demokrasi. Dalam masa transisi selalu terjadi kemungkinan jalan menuju demokrasi berbelok arah kembali ke sistem yang otoriter. Oleh sebab itu diperlukan komitmen seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan yang demokratis dengan terus menerus membangun konsensus yang menjadi landasan menuju ke Indonesia baru.